

## Wanita Dalam Pusaran Ekonomi: Migrasi Orang Yogyakarta ke Besuki Tahun 1930

Refi Refiyanto\*

Magister Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

\*Corresponding author: [refi.refiyanto@gmail.com](mailto:refi.refiyanto@gmail.com)

### ABSTRAK

Kondisi ekonomi yang menurun di wilayah Hindia Belanda (Jawa) pada akhir abad XIX menyebabkan perubahan pola migrasi warga Yogyakarta. Pada awalnya migrasi laki-laki dilakukan ke tempat yang lebih jauh sedangkan perempuan bermigrasi lokal (ulang alik) pergi pagi dan pulang sore hari. Kondisi itu disebabkan oleh perbedaan peran yang masih dianut masyarakat bahwa perempuan masih mempunyai tanggung jawab terhadap anak dan keluarga sedangkan laki-laki pencari nafkah.

Kajian historis melalui studi pustaka ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi pada masyarakat Yogyakarta pada masa itu menyebabkan banyak perempuan yang melakukan migrasi jarak jauh ke karesidenan Besuki yang meliputi wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Jember. Perubahan pola migrasi tersebut juga disebabkan oleh dibangunnya transportasi terutama kereta api. Sekitar 50% dari warga Yogyakarta yang melakukan migrasi adalah perempuan. Sebagian besar migran yang menuju Besuki bekerja pada sektor agroindustri.

Tekanan ekonomi yang terjadi di masyarakat merubah pola pikir tentang peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga. Perempuan berubah dari sekedar mengurus rumah tangga menjadi bekerja pada sektor ekonomi. Sumber-sumber ekonomi yang berada di luar daerah menjadi tujuan. Karena tuntutan tersebut perempuan akhirnya bermigrasi ke sumber ekonomi tersebut walaupun itu jauh dari tempat tinggalnya.

*Kata Kunci: Migrasi; Ekonomi; Perempuan; Sejarah*

### FENOMENA MIGRASI

Suatu pendapat timbul pada akhir abad XIX bahwa di Hindia Belanda, terutanya Jawa, digambarkan kisah menurunnya kesejahteraan penduduk bumi putra. Memasuki abad XX, pemerintah kolonial Belanda mengadakan penyelidikan standar hidup (*Mindere Welvaart Onderzoek*) yang diketahui bahwa kondisi kesejahteraan penduduk bumi putra kian menurun. Hal tersebut kemudian merujuk pada fenomena migrasi masuk dan keluar di tiap karesidenan Hindia Belanda yang disimpulkan mengalami gejala yang serupa, yaitu tanda menurunnya kesejahteraan penduduk bumi putra.<sup>1</sup>

Sebagai suatu kondisi umum, menurunnya kesejahteraan penduduk bumi putra juga terjadi di Karesidenan Yogyakarta. Diketahui pada tahun 1930 jumlah penduduk bumi putra di Yogyakarta mencapai 1.538.868 jiwa (pria: 749.544; wanita: 789.324) dari jumlah total sebanyak 1.559.027 orang.<sup>2</sup> Kemudian dari jumlah total penduduk bumi putra tersebut diketahui sebanyak 1.394.429 orang tidak melakukan migrasi, sementara

---

<sup>1</sup>Dalam menyatakan pendapatnya Gooszen merujuk pada data-data Volkstelling tahun 1930. Hans Gooszen, A Demographic History of The Indonesian Archipelago, 1880-1942, (Leiden: KITLV Press, 1999), hlm. 57.

<sup>2</sup>Volkstelling 1930 Deel II Inheemsche Bevolking van Midden-Java en de Vorstlanden.(Batavia: Departement van Economische Zaken, 1934), hlm. 138-139.

sebanyak 105.664 jiwa merupakan jumlah migrasi keluar tetapi masih dalam satu karesidenan. Mengenai jumlah migrasi keluar menuju lain karesidenan di Hindia Belanda tercatat sebanyak 160.616 orang, dengan jumlah migrasi masuk sebanyak 38.775 orang.<sup>3</sup> Menengok perbandingan jumlah tersebut maka Yogyakarta masuk sebagai kategori wilayah migrasi keluar.<sup>4</sup>

Selanjutnya dari data-data migrasi keluar di berbagai karesidenan di Jawa secara umum ternyata didapati bahwa faktor jarak akan mempengaruhi komposisi para migran yang didasarkan pada jenis kelamin. Para migran pria lebih banyak melakukan migrasi jarak jauh sedangkan wanita sebaliknya. Adapun perbandingan ini yaitu setiap 100 migran wanita terdapat 105 migran pria. Kemudian untuk para migran yang menuju Sumatra. Diketahui setiap 100 migran wanita terdapat 126 migran pria.<sup>5</sup> Untuk di Yogyakarta, mengenai kecenderungan jarak pada jenis kelamin dapat dibuktikan sebagai berikut. Migrasi keluar di Yogyakarta menuju berbagai karesidenan di Jawa Tengah yaitu sebanyak 56.184 pria dan sebanyak 83.874 wanita.<sup>6</sup> Berbeda dengan tujuan migrasi keluar menuju ke berbagai karesidenan di Jawa Timur, di mana jumlah migran pria lebih banyak (29.850 pria dan 25.471 wanita).<sup>7</sup> Lebih lanjut jumlah migrasi keluar tersebut yaitu menuju ke Kabupaten Blitar (5.989 pria dan 4.914 wanita), Kediri (2.893 pria dan 2.185 wanita), Malang (7.527 pria dan 6.892 wanita), Jember (2.618 pria dan 1.979 wanita) dan Banyuwangi (7.117 pria dan 6.150 wanita).<sup>8</sup> Sementara mengenai komposisi migrasi keluar dari tiap kabupaten di Yogyakarta menuju ke berbagai karesidenan di Jawa Timur yaitu dari Kulon Progo (9.520 pria dan 8.037 wanita), Yogyakarta (6.516 pria dan 5.414 wanita), Bantul (2.464 pria dan 2.046 wanita), kabupaten lainnya (11.350 pria dan 9.974 wanita).<sup>9</sup>

Kegiatan migrasi tersebut kendati diperlancar oleh berkembangnya sarana transportasi (kereta), tetapi diketahui faktor jarak memang sangat mempengaruhi. Bagi para migran, jarak selalu akan dikaitkan dengan biaya transportasi, sehingga orang yang penghasilannya rendah dalam melakukan migrasi jarak jauh akan melakukan migrasi permanen atau tinggal menetap dalam jangka waktu lama. Hal berbeda bagi orang dengan penghasilan yang tinggi akan melakukan migrasi sirkuler (jangka waktu sedang) atau ulang-alik. Biasanya bagi mereka yang melakukan kegiatan migrasi ini merupakan para elit pedesaan. Kemudian mengenai kecenderungan migrasi yang disesuaikan dengan jenis kelamin ini tidak terlepas dan ikatan adat yang mengekang keterlibatan pekerja wanita untuk mencari nafkah, terlebih bepergian jauh. Menurut adat, wanita memiliki tanggung jawab dalam urusan rumah tangga, sedangkan mencari nafkah merupakan kewajiban suami. Akibatnya mereka biasanya melakukan migrasi ulang-alik dan pulang setelah pekerjaannya selesai.<sup>10</sup>

---

<sup>3</sup>*Volkstelling 1930 Deel VIII Overzicht voor Nederlands-Indie*. (Batavia: Departement van Economische Zaken, 1936), hlm. 94-95.

<sup>4</sup>Widjojo Nitisastro, *Population Trends In Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1970), hlm. 87.

<sup>5</sup>Hans Gooszen, *op.cit.*, hlm. 73-74.

<sup>6</sup>*Volkstelling 1930 Deel II*, *op.cit.*, hlm.32.

<sup>7</sup>*Volkstelling 1930 Deel III, Inheemsche Bevolking van Oos-Java*, (Batavia: Departement van Economische Zaken, 1934), hlm. 25.

<sup>8</sup>*Volkstelling 1930 Deel III*, *op.cit.*, hlm. 25-26.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 26.

<sup>10</sup>Bambang Sulisty, *Pemogokan Buruh, Sebuah Kajian Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm. 21.

Hadirnya adat tersebut, ternyata mempengaruhi jenis pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Kaum pria umumnya lebih banyak terserap dalam jenis pekerjaan yang banyak ‘menggunakan tenaga’ seperti di sektor pertanian, sementara wanita tampak terserap pada pekerjaan yang lebih ‘halus.’ Tercatat pada tahun 1930 jumlah pekerja yang terserap di sektor agroindustri mencapai 271.068 orang. Adapun rincian jumlah pekerja tiap kabupaten di Karesidenan Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Jumlah Pekerja (Bumi Putra) Agroindustri di Yogyakarta Tahun 1930**

| Kabupaten    | Pria    | Wanita | Jumlah  |
|--------------|---------|--------|---------|
| Gunung Kidul | 62.870  | 18.786 | 81.656  |
| Kulon Progo  | 35.302  | 10.802 | 46.104  |
| Adikarto     | 14.487  | 7.840  | 22.327  |
| Yogyakarta   | 40.478  | 4.845  | 45.323  |
| Bantul       | 57.319  | 18.339 | 75.658  |
| Jumlah       | 210.456 | 60.612 | 271.068 |

Sumber: *Volkstelling 1930 Deel II*, hlm. 91.

Selanjutnya dari jumlah pekerja agroindustri tersebut diketahui jumlah pekerja agroindustri tersebut sebanyak 63.721 orang. Jumlah tersebut diketahui sebanyak 30.533 pekerja pria dan 3.805 pekerja wanita berada di Kabupaten Bantul. Di Kabupaten Yogyakarta jumlah pekerja pria sebesar 18.425 orang dan wanita berjumlah 6.632 orang.<sup>11</sup>

Melalui data sensus tahun 1930, diketahui persentase jumlah pekerja wanita di Yogyakarta sebanyak 35,9%. Kendati angka ini cukup rendah dibandingkan dengan Surakarta yang mencapai 42,1% tetapi cukup tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata di Jawa dan Madura yang rata-rata sebesar 22,7%. Kemudian diketahui bahwa pekerja wanita yang sudah menikah lebih banyak daripada pekerja wanita yang belum menikah. Tercatat persentase pekerja wanita yang sudah menikah sebanyak 56,5%, dengan rincian 73,2% di Kabupaten Kulon Progo, 71,9% di Bantul, 71,6% di Adikarto, 51,8% di Yogyakarta dan 25,2% di Gunung Kidul, sementara persentase pekerja wanita yang belum menikah sebanyak 21,5%.<sup>12</sup> Menengok kembali bahwa kuatnya pengaruh adat di Yogyakarta menyebabkan pekerja wanita tersebut banyak terserap ke dalam sektor industri. Hal ini disebabkan sektor industri lebih memerlukan pekerjaan yang dianggap ‘halus’ jika dibandingkan dengan sektor agraris.

Mengenai jumlah pekerja industri di Karesidenan Yogyakarta yaitu sebanyak 163.397 orang (32.289 pria dan 131.108 wanita). Jenis industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu industri kain sebanyak 65.672 orang (5.541 pria dan 60.131 wanita) dan bambu sebanyak 41.300 orang (4.541 pria dan 36.759 wanita). Adapun konsentrasi industri kain berada di Kabupaten Bantul (1.729 pria dan 32.238 wanita) dan Kulon Progo (194 pria dan 12.539 wanita), sedangkan industri bambu berada di Kabupaten Yogyakarta (1.867 pria dan 18.434 wanita), Kulon Progo (320 pria dan 8.504 wanita) dan Bantul (1.741 pria dan 8.957 wanita).<sup>13</sup>

Polarisasi pada sektor pekerjaan dengan komposisi jenis kelamin ini juga dapat diperhatikan pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti pada tahun 1905 diketahui jumlah pekerja yang tercatat dalam *Kolonial Verslag*

<sup>11</sup>*Volkstelling 1930 Deel II*, *op.cit.*, hlm. 91 dan 95.

<sup>12</sup>*Volkstelling 1930 Deel II*, *op.cit.*, hlm. 89 dan *Volkstelling 1930 Deel III*, *op.cit.*, hlm. 87.

<sup>13</sup>*Volkstelling 1930 Deel II*, *op.cit.*, hlm. 92 dan 96.

di Yogyakarta sebanyak 827.776 orang (690.047 pria dan 137.729 wanita). Dari berbagai sektor pekerjaan, diketahui sebanyak 368.658 orang (361.818 pria dan 6.840 wanita) merupakan jumlah pekerja di sektor pertanian, baik pertanian pangan maupun niaga. Kemudian pada sektor perdagangan, diketahui sebanyak 6.024 pria dan 1.006 wanita merupakan pekerja yang terserap pada sektor perdagangan yang masih terkait dengan pertanian, sedangkan jumlah yang tidak berkaitan dengan pertanian sebanyak 8.268 pria dan 19.954 wanita. Begitu juga dengan sektor industri, di mana komposisi pekerja wanita lebih banyak terserap pada industri yang tidak terkait dengan pertanian (13.308 pria dan 19.162 wanita), dibandingkan dengan sebaliknya (4.624 pria dan 513 wanita).<sup>14</sup>

Meluasnya peresapan ekonomi uang di dalam masyarakat bumi putra, juga berhubungan dengan tekanan kebutuhan rumah tangga menyebabkan cukup banyak pekerja wanita bekerja di sektor agraris yang jumlahnya semakin meningkat. Melihat pada berbagai kasus penyakit, seperti pes, kolera, dan malaria di Yogyakarta, selain disebabkan oleh pemukiman yang padat juga disebabkan oleh buruknya kebersihan lingkungan. Buruknya kebersihan lingkungan tersebut disebabkan para ibu rumah tangga turut bekerja untuk memperoleh tambahan uang, sehingga tidak sempat untuk mengurus rumah.<sup>15</sup> Maraknya pekerja wanita, terutama di sektor agraris ini ternyata menjadi indikasi menurunnya kesejahteraan penduduk.

### PEDALAMAN BESUKI SEBAGAI DESTINASI

Pada tahun 1930, seperti yang diketahui sebelumnya bahwa jumlah migrasi keluar yang terjadi di Yogyakarta sebanyak 160.616 orang. Berdasarkan jumlah tersebut diketahui bahwa tujuan para migran tersebut paling banyak menuju Pantai Timur Sumatra (40.126 orang) dan Besuki (18.034 orang).<sup>16</sup> Adapun jumlah migran Yogyakarta menuju Besuki secara lebih rinci dapat diperhatikan pada tabel berikut.

**Tabel 2. Jumlah Migran Yogyakarta di Besuki Tahun 1930**

| Karesidena n | Jumlah | Kabupaten  | Jumlah                                  | Distrik         | Jumlah                               |
|--------------|--------|------------|---|-----------------|--------------------------------------|
| Besuki       | 18.034 | Banyuwangi | 13.267<br>(7.117 pria dan 6.150 wanita) | Genteng         | 12.874 (6.925 pria dan 5.949 wanita) |
|              |        |            |   | Rojomampi       | 251 (120 pria dan 131 wanita)        |
|              |        |            |   | Distrik lainnya | 142 (72 pria dan 70 wanita)          |
|              |        | Jember     | 4.597 (2.618 pria dan 1.979 wanita)     | Tanggul         | 687 (385 pria dan 302 wanita)        |
|              |        |            |   | Puger           | 2.480 (1.427 pria dan 1.053 wanita)  |
|              |        |            |   | Wuluhan         | 1.155 (669 pria dan 486 wanita)      |
|              |        |            |   | Rampipuji       | 113 (66 pria dan 47 wanita)          |
|              |        |            |   | Distrik lainnya | 167 (71 pria dan 91 wanita)          |

Sumber: *Volkstelling 1930 Deel III*, hlm. 26-27 dan 35; *Volkstelling 1930 Deel VIII*, hlm. 9495.

<sup>14</sup>Kolonial Verslag 1907, Bijlage A, hlm. 37.

<sup>15</sup>Bambang Sulistyono, *op.cit.*, hlm. 67.

<sup>16</sup>*Volkstelling 1930 Deel VIII, loc.cit.*

Berdasarkan tabel tersebut, dan 18.034 orang migran asal Yogyakarta sebanyak 170 orang tersebar di lain kabupaten di Karesidenan Besuki. Kemudian berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui jumlah migran berdasarkan tempat asal kabupaten di Karesidenan Yogyakarta. Jumlah ini tidak seperti di Karesidenan Pasuruan, di mana migran asal Kulon Progo menempati jumlah paling banyak. Di Besuki, diketahui jumlah migran asal Kulon Progo banyak terkonsentrasi di Distrik Wuluhan, sedangkan di Genteng tercatat sebanyak 2.563 orang (1.456 pria dan 1.107 wanita) dan Puger sebanyak 913 orang (520 pria dan 393 wanita). Sementara migran asal Kabupaten Yogyakarta tercatat sebanyak 5.708 orang (3.020 Aria dan 2.688 wanita) terkonsentrasi di Genteng.<sup>17</sup>

Dengan melihat data-data di atas, kemudian merujuk pada keterkaitan antara wilayah asal dengan tujuan maka akan diketahui pola-pola yang terjadi. Sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan erat antara perkembangan jalur kereta api dengan migrasi. Perkembangan jalur kereta api tersebut diharapkan sebagai upaya alokasi tenaga kerja murah di perusahaan-perusahaan agroindustri. Selanjutnya kegiatan alokasi ini diupayakan tidak akan merugikan pihak perusahaan agroindustri, sehingga para migran yang akan tinggal di daerah tujuan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu pendatang harus memiliki hubungan keluarga dengan penduduk asli dan kepala desa harus bisa menjamin bahwa pendatang merupakan orang yang memiliki kepribadian baik.<sup>18</sup>

Mulanya migrasi sejak 1870 dilatarbelakangi oleh pembukaan lahan pertanian baru. Kemudian motivasi beralih untuk mencari pekerjaan di agroindustri. Para migran diketahui bukan kalangan terbaik dalam struktur sosial masyarakat.<sup>19</sup> Kegiatan migrasi ini lebih banyak dilakukan oleh petani yang memiliki lahan sempit dan petani tanpa lahan, terutama dengan tempat tinggal yang padat dibandingkan dengan petani yang memiliki lahan. Pertambahan penduduk Jawa dan Madura yang pesat menyebabkan pembagian sawah semakin mengecil dan pemenuhan kebutuhan hidup juga semakin berkurang. Migrasi yang terjadi pada tahun 1890 banyak disebabkan oleh faktor tersebut, di mana anak yang dilahirkan tahun 1870 telah menginjak usia kawin.<sup>20</sup>

Para migran memiliki kecenderungan melakukan migrasi secara berkelompok dan biasanya berasal dan karesidenan yang sama atau seringkali dan distrik yang sama. Mereka kemudian secara bersama-sama menempati desa tujuan yang sama atau desa yang berdekatan. Para migran cenderung mengikuti kerabat yang sudah bermigrasi dan seringkali kerabat tersebut kembali ketempat asalnya. sehingga terjadi migrasi berantai. Penentuan kerabat, kenalan dan orang-orang dari distrik yang sama tentu akan memberikan

---

<sup>17</sup>Volkstelling 1930 Deel III, *op.cit.*, hlm. 27.

<sup>18</sup>Hal-hal yang akan merugikan pihak perusahaan seperti pembatalan kontrak kerja secara sepihak setelah menerima uang muka. Untuk mengatasi hal demikian *bekel* akan mengadukan kepada polisi dengan tuduhan melalaikan kewajiban. Mereka akan diwajibkan membayar ganti rugi atau dihukum. Selain itu mereka akan ditolak oleh *bekel* yang hendak bekerja di lahan yang dikelolanya walau dengan upah yang rendah. Suhartono, *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta, 1830-1920*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 114-115. Lihat juga Bambang Sulistyono, *op.cit.*, hlm. 15.

<sup>19</sup>Hans Gooszen, *op.cit.*, hlm. 61.

<sup>20</sup>Bambang Sulistyono, *op.cit.*, hlm. 19-20.

keuntungan bagi pihak perusahaan. Hal ini dikarenakan selain dapat diketahui latar belakang calon pekerja juga dapat memberikan kontrol sosial.<sup>21</sup>

Besuki telah menjadi wilayah tujuan favorit bagi para migran dari Jawa dan Madura karena banyak menawarkan lapangan pekerjaan di sektor agroindustri. Selain itu perusahaan juga menawarkan lahan pertanian pribadi yang berada di atau dekat pemukiman penduduk.<sup>22</sup> Tidak hanya itu, para migran dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Surakarta dan Jawa Timur, termasuk Madura, menuju dan menetap di sebelah selatan Lumajang, Jember dan Banyuwangi karena tersedia lahan kosong yang luas dan memiliki tingkat kepadatan yang lebih rendah dari pada daerah asal mereka.<sup>23</sup>

Faktor lahan yang luas ini yang artinya dengan tingkat kepadatan penduduk yang luas menjadi sangat penting sebagai daya tarik migrasi. Seperti yang diketahui dari data-data wilayah tujuan migrasi di atas, banyak migran terkonsentrasi di wilayah pedalangan, padahal tidak dipungkiri bahwa wilayah pesisir utara Jawa sudah lama menjadi wilayah perusahaan agroindustri. Dengan demikian, apabila disandingkan dengan dampak krisis ekonomi dunia maka terjadinya rasionalisasi pada perusahaan-perusahaan niaga menyebabkan pengurangan upah bahkan jumlah pekerja menyebabkan masyarakat mulai kembali pada pola ekonomi subsisten.<sup>24</sup> Hal ini menyebabkan wilayah dengan tersedianya lahan-lahan yang masih kosong menjadi sangat berpotensi.

Selain itu longgarnya ikatan kekuasaan lokal di Besuki jika dibandingkan dengan yang terjadi di Yogyakarta tampaknya menjadi daya tarik yang lainnya. Mengenai kondisi birokrasi di Yogyakarta dapat dikatakan memiliki tingkatan yang panjang dan ketat. Hal ini menyebabkan jumlah pajak dan kerja wajib yang ditetapkan lebih besar dari pada yang terjadi di Besuki. Di Yogyakarta, disebutkan bahwa setiap penduduk pemilik lahan yang tidak sanggup membayar pajak dan melaksanakan kerja wajib dapat dicabut haknya atau bahkan diusir dari desa tempat tinggalnya.<sup>25</sup> Hal yang sama juga berlaku bagi penduduk yang melakukan pemindahan hak lahan kepada orang lain, di mana gejala ini banyak terjadi di Yogyakarta akibat tekanan ekonomi sehingga menyebabkan jumlah *kuli tlosor* semakin meningkat.

Para migran dari Yogyakarta semula tidak memiliki lahan di daerah tujuan. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya *kuli tlosor* di pedalangan Besuki. *Kuli tlosor* ini pada perkembangannya mengalami mobilisasi sosial vertikal menjadi *kuli indhung* atau *kuli setengah kenceng* setelah mengolah lahan penduduk setempat melalui bagi hasil dengan sistem *maro* atau *mertelu*.<sup>26</sup> Munculnya *kuli indhung* dan *kuli setengah kenceng* menyebabkan para penduduk setempat yang memiliki lahan berubah menjadi *kuli kenceng* atau *sikep*.

---

<sup>21</sup>Hans Gooszen, *op.cit.* hlm. 61.

<sup>22</sup>Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 67. Kondisi yang serupa juga terjadi di Karesidenan Pasuruan dan Kediri, hanya saja pada tingkatan yang lebih rendah dari Karesidenan Besuki. Hans Gooszen, *op.cit.*, hlm. 67.

<sup>23</sup>Volkstelling 1930 Deel III, *op.cit.*, hlm. 101.

<sup>24</sup>Nathan Keyfitz dan Widjojo Nitisastro, *Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Pembangunan, 1964), hlm. 70-71.

<sup>25</sup>Suhartono, *op.cit.*, hlm. 40.

<sup>26</sup>A. M. P. A. Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, terj. Anonim, (Jakarta: Obor, 1985), hlm. 146 dan 149-150.

## DAFTAR REFERENSI

- Hans, Gooszen. 1999. *A Demographic History of The Indonesian Archipelago, 1880- 1942*. Leiden: KITLV Press.
- Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo, 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Nathan, Keyfitz dan Widjojo Nitisastro. 1964. *Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Pembangunan.
- Nitisastro, Widjojo. 1970. *Population Trends In Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Sulistyo, Bambang. 1995. *Pemogokan Buruh, Sebuah Kajian Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Scheltema, A. M. P. A.. 1985. *Bagi Hasil di Hindia Belanda (terj)*. Anonim, Jakarta: Obor.
- Suhartono, 1991. *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920)*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Volkstelling. 1930. *Deel II Inheemsche Bevolking van Midden-Java en de Vorstlenlanden*. Batavia: Departement van Economische Zaken, 1934.
- Volkstelling. 1930. *Deel III Inheemsche Bevolking van Oost-Java*. Batavia: Departement van Economische Zaken, 1934.
- Volkstelling. 1930. *Deel VIII Overzicht voor Nederlands-Indie*. Batavia: Departement van Economische Zaken, 1936.
- Wasino dan Endah Sri Hartatik. 2018. *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.